

Membangun SDM Polri yang Selaras dengan Reformasi Polri serta Tantangan Tugas Polri Kedepan

Oleh : Komisaris Jenderal Polisi Drs. Adang Daradjatun

Sumber Daya Manusia Polri sebagai asset terpenting yang dimiliki Polri, harus memiliki kapabilitas untuk memberikan kontribusi yang produktif bagi organisasi dan merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Polri.

BAGI Polri, pembinaan SDM merupakan sesuatu yang strategis dalam mewujudkan paradigma baru sebagai institusi sipil yang mampu untuk menjaga/memelihara Kamtibmas, penegakan hukum dan selaku pengayom, pelindung, pelayan masyarakat serta untuk mewujudkan Polri sebagai institusi Kepolisian yang mandiri, akuntabel dan kompeten. Polri harus menindaklanjuti keluhan atau ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Polri secara konsisten dan konsekuen serta menjamin partisipasi publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi Polri sedang bergulir melalui redefinisi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan dengan melakukan demiliterisasi dan kembali pada tugas pokoknya. Dengan semangat untuk menuju Polisi Sipil yang profesional dalam tatanan masyarakat madani yang menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, HAM, transparansi dan keadilan, *"reformasi Polri"* pada dasarnya adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam membangun dan memperkuat identitas, penguat visi dan misi, me-

ningkatkan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, mengembangkan instrumen dan fasilitas pelayanan serta membangun budaya dan etika profesi". Semua proses tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bernilai tambah bagi masyarakat. Karenanya,

Polri berusaha untuk melakukan reformasi secara menyeluruh pada aspek struktural, instrumental dan kultural.

Dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, Polri berupaya untuk membangun Polisi yang mandiri dan profesional. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat masa kini yang sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang ditandai dengan adanya kecenderungan lingkungan strategic global maupun regional dan pengaruhnya terhadap situasi nasional di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta dampaknya di bidang hukum berupa gangguan keamanan dan ketertiban, ditandai dengan bergulirnya isu demokratisasi, Hak Azasi Manusia dan lingkungan hidup

yang kesemuanya mengandung banyak ketidakpastian.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembangunan Sumber Daya Manusia Polri yang selaras dengan reformasi Polri dalam menghadapi tantangan tugas Polri kedepan, berikut ini akan disampaikan materi tentang : *"Keyakinan" atas keberhasilan reformasi Polri; Tantangan tugas Polri kedepan; dan Sumber Daya Manusia yang selaras dengan reformasi Polri*".

"Keyakinan" atas Keberhasilan Reformasi Polri

Pada awalnya, reformasi nasional *"terus bergulir"* dengan cepat. Untuk menghadapi reformasi nasional tersebut segera dibentuk **"Kelompok Kerja Mabes ABRI" yang terdiri dari Perwira-per-**

wira Tinggi Polri dan TNI (Darat, Laut, Udara). Pada tanggal 1 Oktober 1998, Tim Pokja Mabes ABRI selanjutnya menerbitkan suatu kajian yang berjudul: **“Reaktualisasi kedudukan, fungsi dan peran Polri”**. Kesimpulan dan saran kajian tersebut adalah :

1. Bahwa kedudukan Polri dalam ABRI pada kenyataannya memiliki kelemahan.
2. Tuntutan perkembangan lingkungan strategis perlu dicermati dan diantisipasi dengan baik, dikaitkan dengan tugas, fungsi dan peran Polri.
3. Reaktualisasi dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis, karena memang terdapat perbedaan antara tugas pokok Polri dengan angkatan perang.
4. Sebagai konsekuensi dari reaktualisasi di semua aspek, antara lain di bidang operasional, pembinaan, perangkat lunak dan perangkat keras, diperlukan upaya perumusan, penentuan prioritas sasaran dan pengendalian guna meminimalkan risiko yang timbul.

Saran :

1. Perlu adanya keputusan politik bahwa Polri akan segera mandiri/otonom.
2. Adanya TAP MPR atas tindak lanjut keputusan politik dan yang harus dijabarkan oleh aparat lain yang terlibat/terkait.
3. Adanya penyesuaian atas ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Polri.
4. Departemen Hankam/Mabes ABRI segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit.
5. Pentahapan yang dilakukan bukan pentahapan status tetapi pentahapan menuju kemandirian Polri.

Setelah kajian-kajian tersebut diterima oleh pimpinan ABRI saat itu, proses reformasi di tubuh Polri terus dimantapkan. Atas perintah

Kapolri saat itu, Asrena Kapolri membuat Program Reformasi Polri. *“Tim kecil”* yang dibentuk dengan beberapa Perwira Polri lainnya terus bekerja dengan melibatkan para Pakar Kepolisian yang memiliki lintas disiplin ilmu, termasuk kalangan Akademisi dari perguruan tinggi dan kalangan masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan serta masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat luas yang kompeten, maka dilakukan seminar, lokakarya, kunjungan ke perguruan tinggi dan kegiatan sosialisasi lainnya, sehingga diperoleh arah/pedoman dalam membangun Polri yang profesional dan dekat dengan masyarakat.

Tim Pokja Reformasi Polri selanjutnya menyusun **“Buku Biru Polri”** yang berjudul **“Reformasi Menuju Polri yang Profesional”**. Proses pembuatan **“Buku Biru Polri”** banyak tantangan, oleh karena itu Tim kecil membuat **“Tim Gabungan”** dengan para pakar antara lain **Prof. Satjipto Rahardjo, Prof. Sahetapy, Prof. Awa-loedin Djamin** dan para pakar Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Menjelang 1 Juli 1999, **Buku Reformasi Polri** berhasil dibuat di lembaga pendidikan Polri/Sespim Polri dan dituntaskan di Hotel Gunung Putri Lembang Bandung, tanggal 1 Juli 1989 **“Buku Biru Polri”** disebarluaskan di jajaran Polri; Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk bahan kajian Hal mendasar/esensi dari buku tersebut adalah : *“Polri harus segera merubah paradigma dibidang Instrumen, Stuktur dan Kultur”*.

Tindak lanjut dan perkembangan pada tahun-tahun berikutnya adalah terwujudnya berbagai perubahan/paradigma tersebut dalam bentuk :

Instrumen

1. Pasal 30 UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2000

- tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam lingkungan Polri selanjutnya ditindaklanjuti dengan:

1. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, beserta perubahannya
2. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah, beserta perubahannya.

Instrumen-instrumen tersebut di atas mendudukan Polri pada posisi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri. Hal tersebut ditandai dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang bersifat otonom dan mandiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan kedudukan tersebut diharapkan Polri akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur

Dalam masalah struktur, Polri menganut Integrated System sebagai Kepolisian Nasional Indonesia. Pendekatan pengorga-

nisasian Polri sebagai Polisi Nasional dilaksanakan secara **bottom Up** dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada kesatuan kewilayahan.

Guna menindaklanjuti reformasi Polri, maka struktur kelembagaan Polri disusun sebagai berikut :

1. Tingkat Mabes Polri, sebagai perumus kebijakan politik strategi keamanan.
2. Tingkat Polda, sebagai **Kesatuan Induk Penuh (KIP)** untuk merumuskan kebijakan strategis di wilayahnya, menyelenggarakan keamanan dan semua tindakan Polisional dengan memperhatikan otonomi daerah serta pembinaan kelembagaan Kepolisian sebagai jabaran dari politik strategi keamanan yang ditetapkan Mabes Polri.
3. Tingkat Poltabes dan Polres sebagai **Kesatuan Operasional dasar (KOD)** adalah pelaksana utama Polda, mengemban dan melaksanakan semua fungsi operasional dan fungsi manajemen Kepolisian bagi

terselenggaranya keamanan di wilayah hukumnya.

4. Tingkat Polsek sebagai **ujung tombak operasional Polri** dan merupakan satuan operasional di bawah kendali Polres yang melaksanakan dan memberi pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terus menerus sepanjang waktu.
5. Titik-titik pelayanan terdepan oleh pengemban diskresi, yaitu setiap anggota Polri yang bertugas ditengah-tengah masyarakat dan dapat mengambil tindakan Kepolisian berdasarkan hukum dan pertimbangannya.

Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga masyarakat merasakan dan puas akan pelayanan Polri. Organisasi Polri harus **"hemat struktur tetapi kaya fungsi"**, dengan mempertimbangkan peran, fungsi, politik strategi keamanan, budaya/karakteristik daerah dan sebagainya. Oleh karena itu, pada struktur organisasi Polda memiliki ciri khas masing-masing sesuai daerahnya dan struktur organisasi pada tingkat Mabes Polri dilaku-

kan **"Re-grouping"** (PPNS/Binmas) maupun penyusunan melalui pendekatan **"beban tugas"** (NCB-Interpol).

Kultur

Perubahan pada aspek kultur adalah muara dari perubahan aspek **struktur** dan **instrument**. Aspek kultur menggambarkan budaya Kepolisian yang dapat secara langsung ditanggapi oleh masyarakat melalui pujian, celaan, rasa puas, rasa tidak puas dan sebagainya, atas sikap dan perilaku Polri.

Setelah reformasi bergulir, terjadi perubahan sosial yang cepat dan berdampak pada timbulnya berbagai masalah sosial yang kompleks.

Hal ini memerlukan penyesuaian dan penataan pengelolaan SDM Polri untuk mewujudkan personel Polri yang mahir (cekat-an), terpuji (etis) dan patuh hukum (taat), agar dapat menjadi sosok Polri yang profesional, bermoral dan modern sesuai dukungan dari publiknya.

Untuk mendapatkan personel Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Memilih calon-calon anggota Polri yang memenuhi persyara-



tan jujur, bertanggung jawab, rela berkorban bagi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi dan nilai kemanusiaan yang tinggi, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik

2. Merubah sistem pendidikan di jajaran Polri dalam bidang kurikulum dan bahan ajaran (lebih kepada aspek hukum dan sosial kemsyarakatan). Berbagai substansi pendidikan muatan lokal/budaya setempat
3. Melaksanakan paradigma baru Polri dalam hal : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; berperilaku selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Sampai saat ini ketiga aspek **instrumen, struktur dan kultur** tersebut masih dan harus terus ditindaklanjuti serta dikembangkan (*"terus direformasi"*) disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis/global, regional maupun nasional, karena *reformasi Polri merupakan momentum yang wajib ditindaklanjuti oleh Polri* untuk mempertahankan dan atau merumuskan secara terus menerus atas kedudukan, tugas dan peran Polri sesuai aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani, sehingga terwujud sosok *Polri yang mandiri dan profesional*.

Ciri-ciri seorang profesional adalah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dalam jiwa dan setiap moral perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak. **Profesional** berarti harus mempunyai dasar/basis ilmu pengetahuan dan pengalaman, ketrampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai serta mempunyai kode etik atau etika pprofesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas.

Profesional berarti harus mempunyai dasar/basis ilmu pengetahuan dan pengalaman, ketrampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai serta mempunyai kode etik atau etika pprofesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas.

Tantangan Tugas Polri Kedepan

Pada masa mendatang situasi dan kondisi Polri akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan.

Kepekaan (*sensitivitas*) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif serta mengembangkan model Perpolisian yang berpihak kepada masyarakat, berorientasi pada pemecahan masalah-masalah masyarakat, dengan berbasis pada kedekatan pada masyarakat yang lebih manusiawi.

Dalam upaya mengantisipasi ke depan yang penuh ketidak pastian dan dikaitkan juga dengan perubahan sistem ketatanegaraan, dimana pemerintah saat ini tidak ada lagi berkewajiban untuk menetapkan Garis-garis Gesar Haluan Negara, maka hal tersebut berpengaruh juga terhadap institusi Polri, khususnya dalam rangka pembuatan produk strategis yang bersifat perencanaan kedepan,

baik jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek.

Adapun berbagai perkembangan permasalahan kedepan yang akan dihadapi antara lain :

Globalisasi

1. **Teknologi yang semakin canggih**, telah membawa kehidupan umat manusia pada tingkatan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Saat ini kita dapat menikmati suatu peristiwa *"live"* (real time at different places) yang bersamaan waktunya di berbagai belahan dunia. Kecepatan dan ketepatan menjadi tuntutan umat manusia. Pada sisi positif, teknologi yang semakin canggih dimaksudkan untuk kemajuan peradaban dan perdamaian serta kesejahteraan umat manusia. Pada sisi negatif teknologi yang semakin canggih juga digunakan menyimpang untuk tujuan kejahatan.
2. **Global/tanpa batas**, telah menjadi obsesi manusia tanpa peduli batas benua, batas negara dan batas wilayah apapun, yang tidak lebih dari sekedar *"imaginary line"*, karena segala sesuatunya dapat diakses dan menembus batas-batas tersebut tanpa kesulitan.
3. **Kejahatan antar negara/transnational crime**, menjadi agenda pokok pada pembicaraan para aparat penegak hukum tingkat regional maupun internasional dan kerjasama berbagai bidang terus berkembang guna pencegahan dan penegakan hukum kejahatan antar negara tersebut.

Sumber Daya

1. **Illegal logging**, berpotensi merugikan keuangan negara dan tetap menjadi masalah nasional, regional maupun internasional. Penebangan liar yang terjadi di hutan-hutan di Indonesia berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dida-



lamnya dan pada tingkat internasional disebut-sebut penyebab “*global warming*”. Dampak lainnya seperti kabut asap dari pembakaran hutan sebagai penyebab pencemaran udara dan terganggunya sistem penerbangan di dalam negeri dan negara tetangga.

2. **Illegal Mining**, juga berpotensi merugikan keuangan negara dan tetap menjadi masalah nasional, regional maupun internasional. Berbagai kerjasama lintas departemental perlu terus ditingkatkan guna mengeliminir dampak negatif dari *illegal mining*.
3. **Illegal Fishing**, merupakan permasalahan klasik yang tidak mudah dituntaskan karena menyangkut kondisi geografis Indonesia dan keterbatasan sarana/prasarana yang ada untuk dapatnya dilakukan pencegahan maupun penegakan hukum.

Latar Belakang Politis

Konflik Massa, menjadi permasalahan horizontal yang apabila tidak dicermati secara seksama dan komprehensif dapat menjadi permasalahan yang lebih besar dan

berkepanjangan dalam konteks yang lebih luas.

Latar Belakang Budaya/Daerah

Konflik SARA, merupakan permasalahan yang bersifat antagonis, karena pada satu sisi, diarahkan pada proses globalisasi menuju pada kebudayaan yang mendunia, namun pada sisi yang lain, sifat-sifat kebudayaan/kedaerahannya ingin tetap dipertahankan.

Masalah-masalah Keamanan

1. **Sparatis**, merupakan paham dan doktrin yang tetap melekat pada sebagian masyarakat yang merasa tidak diikutsertakan dan atau tidak menikmati hasil-hasil pembangunan.
2. **Kejahatan tradisional**, sebagai bagian dari kehidupan manusia akan tetap berpotensi meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sdm yang Selaras dengan Reformasi Polri

1. NILAI-NILAI

Untuk dapatnya melanjutkan reformasi kultural dalam menghadapi masa depan yang semakin

kompleks, Polri akan mereformasi pola kerja dan perilaku anggota Polisi berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Keunggulan (*excellence*), orientasi pada prestasi (*achievement*), dedikasi kejujuran (*honesty*) dan kreativitas.
- b. Integritas (*integrity*), orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral (*ethic values an morality*).
- c. Akuntabilitas (*accountable*), berorientasi pada sistem yang *traceable* (dapat ditelusuri jalurnya yang logis) *auditable* (dapat diaudit dan diperbaiki),

mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.

- d. Transparansi, orientasi pada keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*) serta tidak diskriminatif.
- e. Keberlanjutan, orientasi kepada perbaikan secara terus menerus dan masa depan.

2. SDM DAN REFORMASI

Sebagaimana kita ketahui bahwa rasio Polri dengan penduduk pada akhir tahun 2010 diharapkan dapat mencapai 1:500. Peningkatan kualitas dilakukan melalui pendidikan pengembangan dan pelatihan kepada Perwira dan Bintara pelaksana tugas lapangan. Secara bertahap kepangkatan Tamtama akan dihapuskan, strata kepangkatan akan disederhanakan dan pemberdayaan PNS sebagai komplemen akan terus dimantapkan. Pengalokasian kekuatan Personel dan PNS Polri terus ditata, sehingga di Mabes Polri hanya 5% di Mapolda 20% dan di Polres serta Polsek 75% dari kekuatan Polri. Penambahan kekuatan personel diprioritaskan untuk pengisian pada satuan kewilayahan baru dan

satuan operasional.

Kepemimpinan yang Strategis menjadi mutlak untuk dapat menyelenggarakan program-program tersebut. Hal mana disesuaikan dengan tingkatan kepangkatan/jabatan.

Kepemimpinan yang strategis senantiasa :

1. **Berorientasi pada visi**, yaitu mampu berefleksi untuk mengenal kemampuan dan potensi manusia dengan membuat hubungan yang logis dalam memecahkan masalah kedalam unsur yang kecil.
2. **Keinginan adanya perubahan**, yaitu mampu melihat skenario besar untuk menghasilkan hal-hal baru, merubah/menambah dan membuat terobosan/ inovasi.

Hal yang harus selalu disadari bahwa **keberhasilan reformasi Polri** bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Dengan kata lain, apabila kita mampu melihat peluang perubahan lingkungan yang berpengaruh, yang terjadi didalam masyarakat/elite politik, dengan memegang teguh/berorientasi pada visi dan dibarengi dengan tindakan nyata karena adanya keinginan yang kuat untuk suatu perubahan guna menggugat kemapanan/-menggoyahkan keseimbangan sistem, maka "**keberhasilan**" adalah kunci jawaban atas segala upaya yang dilakukannya.

Apa Itu Visi?

Visi adalah cahaya yang membimbing kedepan dan mendorong organisasi, sebagai faktor yang vital sekaligus sarana primer bagi organisasi untuk memperbaharui diri dan menetapkan arah baru. Visi adalah kunci menuju kepemimpinan yang sukses dan kepemimpinan yang sukses

akan menuju kepada keberhasilan organisasi, karena tidak ada penggerak organisasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan keberhasilan masa depan kecuali visi yang menarik, berpengaruh dan dapat diwujudkan serta mendapat dukungan yang luas.

Visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menarik bagi organisasi, sekaligus merupakan pernyataan kemana organisasi akan dibawa, sebuah masa depan yang lebih baik, lebih berhasil dan lebih diinginkan dari

keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

pada kondisi sebelumnya atau sekarang. Visi selalu berhubungan dengan masa depan, karena visi adalah awal dari masa depan. Di dalam perumusan visi terdapat gagasan dan gambaran tentang masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Visi yang benar adalah gagasan yang penuh kekuatan dan mendesak dimulainya masa depan dengan mengandalkan ketrampilan, bakat dan Sumber Daya dalam mewujudkannya. Visi berperan sejak awal dan pada keseluruhan proses terhadap organisasi dan kemana arahnya. Visi adalah intisari kepemimpinan dan merupakan alat yang tidak tergantikan. Visi merupakan artikulasi cita-cita, idealisme, harapan yang ingin diwujudkan masa depan.

Visi membentuk seseorang menjadi pemimpin dan bukan

sebaliknya, pemimpin yang membentuk visi.

Ciri-ciri Visi

1. **Realistik**, karena relevan dengan kondisi saat ini, sehingga memberi realisme bagi perumusan visi masa depan.
2. **Kredibel**, karena mengandung standar *excellence/kehebatan* dan mencerminkan idealisme yang tinggi.
3. **Sangat berharga**, karena mencerminkan aspirasi *stakeholders*, mencerminkan kekhlasan organisasi/fungsi yang mendasar dan menyinarkan tekad untuk mencapai visi tersebut.

Berbagai langkah-langkah strategis telah, sedang dan harus ditindaklanjuti dalam merespon tuntutan reformasi nasional dan reformasi Polri guna dapat menghadapi tantangan tugas pokok Polri ke depan, yaitu menuju Polri yang mandiri dan profesional, "*Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera*".

Oleh karena itu permasalahan yang tidak pernah mengenal kata henti adalah *membangun Sumber Daya Manusia Polri, karena SDM Polri harus terus mengikuti segala perubahan lingkungan yang berpengaruh, sehingga SDM Polri selalu dapat diterima oleh lingkungannya.*

Mudah-mudahan Polri *memiliki daya untuk membangun SDM Polri yang selaras dengan Reformasi Polri agar dapat menjawab tantangan tugas Polri kedepan* melalui pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.***